

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI KANTIN KEJUJURAN
DI SMP NEGERI 1 GALUR**

JURNAL



Oleh :

Dewi Ratnasari
NIM. 14416241018

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI KANTIN KEJUJURAN DI SMP NEGERI 1 GALUR

THE IMPLEMENTATION OF ANTICORRUPTION EDUCATION THROUGH THE HONESTY CANTEEN AT SMP NEGERI 1 GALUR

Oleh : Dewi Ratnasari dan Dr. Nasiwan, M.Si, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta

dratnasari395@gmail.com

ABSTRAK

SMP Negeri 1 Galur merupakan sekolah yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui implementasi pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur, (2) mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Galur pada bulan Februari-Mei 2018. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Pengelola Kantin, Guru IPS, dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilengkapi dengan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, sedangkan analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur dimulai dari sosialisasi program, penentuan tujuan, pembentukan pengurus, pembuatan program kerja, pendanaan, pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP), dan pengadaan sarana prasarana. (2) Pelaksanaan kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur terdiri dari : mekanisme pelaksanaan (penentuan jenis barang, pengadaan barang dan mekanisme pelaksanaan), manajemen pengelolaan (pengelola kantin dan strategi pengelolaan), perkembangan karakter siswa, dan partisipasi warga sekolah (sekolah, guru, dan siswa). (3) Evaluasi kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur melalui tahap pembuatan laporan keuangan dan pelaporan laporan keuangan (4) Faktor Pendukung : (a) adanya jadwal piket kantin kejujuran (b) adanya Penguatan Pendidikan Karakter (c) sarana dan prasarana memadai (d) partisipasi warga sekolah. (5) Faktor penghambat : (a) manajemen pengelolaan, dan (b) keterlambatan penerimaan barang.

Kata kunci : pendidikan antikorupsi, kantin kejujuran

ABSTRACT

SMP Negeri 1 Galur is a school that implements anticorruption education through the honesty canteen. This study aims to investigate: (1) the implementation of anticorruption education through the honesty canteen at SMP Negeri 1 Galur, and (2) the factors that support and inhibit the implementation of anticorruption education through the honesty canteen at SMP Negeri 1 Galur. This was a qualitative study using the case study method. It was conducted at SMP Negeri 1 Galur in February-May 2018. The research subjects were the principal, vice principal in charge of the curriculum, canteen's managerial board, Social Studies teachers, and students. The data were collected through observations, interviews, and documentation supplemented by research instruments in the form of observation, interview, and documentation guides. The data trustworthiness was enhanced by technique and source triangulations. The data analysis consisted of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study are as follows. (1) The honesty canteen planning at SMP Negeri 1 Galur starts from

the program socialization, goal setting, management establishment, work program making, funding, Standard Operational Procedure (SOP) making, and infrastructure procurement. (2) The implementation of the honesty canteen at SMP Negeri 1 Galur consists of: implementation mechanism (determination of goods types, procurement of goods, and implementation mechanism), management organization (canteen management and management strategy), student character development, and participation of the school community (school, teachers, and students). (3) The evaluation of the honesty canteen at SMP Negeri 1 Galur is conducted through the stages of financial statement making and financial statement reporting. (4) The supporting factors include: (a) the availability of the honesty canteen shift schedule, (b) the existence of Character Education Reinforcement (CER), (c) the adequate facilities and infrastructure, and (d) the school community participation. (5) The inhibiting factors include: (a) management organization, and (b) delay in receipt of goods.

Keywords : anticorruption education, honesty canteen

PENDAHULUAN

Korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi bersifat merusak karena merugikan masyarakat dan negara. Korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan masih banyak terjadi seolah-olah telah mengakar dan membudidaya.

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi per 30 September 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tindak pidana korupsi dengan rincian : penyelidikan 70 perkara, penyidikan 78 perkara, penuntutan 58 perkara, inkracht 48 perkara, dan eksekusi 49 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 918 perkara, penyidikan 645 perkara, penuntutan 523 perkara, inkracht 436 perkara, dan eksekusi 463 perkara (*Anti Corruption Clearing House* (ACCH), diakses tanggal 3 Desember 2017).

Tabel 01. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi

PENINDAKAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	70
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	99	78
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	58
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	38	71	48
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	49

Sumber : <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

Perkembangan korupsi juga mendorong strategi pemberantasan korupsi. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Mengingat kondisi tersebut, maka diperlukan strategi, cara, dan upaya untuk memberantasnya. Praktik pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini pun telah dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun penanggulangan (*represif*).

Salah satu upaya meminimalisasi atau bahkan menghentikan segala perbuatan korupsi yaitu melalui pencegahan. Pemberantasan korupsi tidak bisa lepas dari sisi pencegahan karena tanpa pencegahan yang efektif, pemberantasan korupsi tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam jangka waktu

yang panjang. Salah satu pencegahan yang efektif dapat dilakukan dengan cara membentuk perilaku-perilaku antikorupsi melalui jenjang pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

Salah satu nilai dasar yang perlu ditanamkan dalam pembentukan perilaku antikorupsi adalah nilai kejujuran. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun sendiri terhadap pihak lain (Mustari, 2014: 11). Apabila siswa sejak dini telah memiliki dan mampu menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan untuk jangka waktu ke depan, siswa mampu senantiasa berperilaku jujur.

Kasus mengenai ketidakjujuran, terutama di bidang pendidikan banyak terjadi di Indonesia. Dikutip dari berita detiknews (diakses pada tanggal 2 Januari 2018) bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) masih terus mendapatkan koreksi dari orangtua siswa dan guru. Serikat guru menyebut masih ada praktik jual beli jawaban dan soal UN oleh siswa. Kunci jawaban masih beredar di kalangan siswa yang membeli dengan cara patungan. Menurut Slamet Maryanto selaku Sekretaris Umum Serikat Guru Indonesia (Segi) Jakarta menjelaskan bahwa "Mulai dari Rp 20.000 per siswa di Cimahi, Rp 150.000 per siswa di Jakarta sampai Rp 300.000 per siswa di Parepare. Laporan yang masuk justru berasal dari orangtua siswa karena anaknya meminta uang untuk membayar patungan tersebut".

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat diperlukan penanaman karakter kejujuran kepada siswa sejak dini. Banyaknya kasus ketidakjujuran di kalangan pelajar terkait erat dengan kasus tindak pidana korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya korupsi yaitu perilaku tidak jujur. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menanamkan karakter kejujuran yaitu melalui pendidikan antikorupsi di sekolah.

Pendidikan antikorupsi sangat efektif dilaksanakan pada lingkungan sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi. Sekolah merupakan lembaga yang mampu berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Pendidikan antikorupsi di sekolah sangat efektif sebagai upaya edukatif mendidik generasi muda sehingga berkarakter jujur, bermoral baik, dan dapat bertanggung jawab. Tujuan pendidikan antikorupsi yaitu mencegah berlanjutnya siklus korupsi di masa mendatang, karena siswa merupakan generasi masa depan yang diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi.

Secara umum, lembaga pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur melalui pembiasaan. Dalam membentuk kebiasaan dapat dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, dengan cara pengulangan dan *Kedua*, dengan disengaja dan direncanakan. Berangkat dari pemahaman ini, lembaga pendidikan sangat memungkinkan memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga pendidikan dapat memainkan peran aktifnya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai luhur. Generasi yang memiliki jati diri secara jelas, serta mampu menjaga nurani dari pengaruh tindakan nista. Memiliki kesadaran moral untuk memberantas tindak korupsi dengan memulainya dari diri sendiri (Nurdjana, 2006: 190-191).

Pendidikan antikorupsi dapat berbentuk apa saja, tidak hanya melalui cara-cara lama yang *mainstream* layaknya gambar-gambar, orasi, seminar, *workshop*, lokakarya, sarasehan, dan sejenisnya, akan tetapi juga dapat melalui seni seperti melalui buku, film, musik, poster, dan lainnya (Rosikah, 2016: 111). Pendidikan antikorupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dengan semua mata pelajaran (Wijaya, 2014: 49).

Salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan pendidikan antikorupsi adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Menurut Supardan (2015: 16), IPS adalah salah satu bidang studi atau pelajaran, yang mencakup sejumlah ilmu-ilmu sosial yang diorganisir untuk program-program pembelajaran di kelas.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu sosial. Menurut Santoso (2014: 11), tujuan pendidikan IPS untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran IPS sangat relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada siswa.

Pada kenyataannya, belum semua sekolah yang ada di Indonesia sudah menerapkan pendidikan antikorupsi. Integrasi pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran berarti sekolah tersebut perlu mengembangkan lagi kurikulum yang membahas mengenai pendidikan antikorupsi. Akan tetapi, jauh sebelum mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran, bentuk pendidikan antikorupsi yang sudah dijalankan selama ini yaitu melalui kantin kejujuran. Kantin kejujuran merupakan program yang dibentuk oleh KPK untuk mendorong setiap guru dapat membimbing muridnya dalam membangun karakter yang jujur melalui warung kejujuran yang diakomodasi dari murid itu sendiri. Kantin Kejujuran itu sendiri dibentuk pada tahun 2008 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung.

Kantin kejujuran bisa menjadi tempat pembelajaran bagi siswa tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri, yang harapannya akan lahir generasi yang menghormati kejujuran sekaligus memunculkan generasi anti korupsi. Pelaksanaan kantin kejujuran ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai hambatan yaitu mengalami kerugian. Dikutip dari halaman berita *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (diakses pada tanggal 5 Januari 2018) bahwa banyak kantin kejujuran yang didirikan di sekolah mulai tingkat SD hingga SMA, hanya beberapa yang dikategorikan berhasil. Penyebab kebangkrutan kantin kejujuran tersebut, antara lain, moralitas siswa. Moralitas siswa ini dapat diukur dari jumlah siswa yang

tidak jujur dalam membayar. Jika pada usia muda tidak ditekankan untuk bersikap jujur pada diri sendiri, kemungkinan upaya untuk bertindak korupsi semakin besar. Jika siswa tidak membayar makanan atau barang yang dibeli dari kantin tersebut, berarti siswa bersangkutan secara tidak langsung melakukan korupsi dari pihak pengelola.

Salah satu sekolah yang masih menerapkan pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran adalah SMP Negeri 1 Galur. Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Galur resmi dibuka dengan harapan siswa memiliki nilai-nilai kejujuran karena para siswa merupakan generasi penerus bangsa. Keberadaan kantin kejujuran ini hampir sama dengan kantin kejujuran di sekolah lain, yaitu dibuka tanpa ada penjaganya, bahkan tidak memerlukan CCTV dan siswa dapat mengambil makanan atau minuman secara swalayan dan mengambil sendiri uang kembaliannya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Galur".

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggali lebih dalam lagi mengenai Pendidikan Antikorupsi melalui kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang perilaku yang dapat diamati sehingga dapat menemukan kebenaran dari masalah tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Galur, yang berlokasi di Jalan Raya Brosot No 20, Brosot, Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Penelitian ini dimulai dengan penyusunan proposal pada Bulan Februari 2018 sampai dengan penyelesaian laporan pada Bulan Juni 2018.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sampel yang sudah ditentukan, yaitu *Purposive Sampling*. Subjek

penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, pengelola kantin kejujuran, guru, dan siswa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan semiterstruktur. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data tentang kantin kejujuran yang diperoleh dari pengelola kantin kejujuran SMP Negeri 1 Galur.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Keabsahan Data

Langkah yang digunakan untuk uji keabsahan data, yaitu menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid. Triangulasi teknik mengharuskan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data yaitu memilih data yang akan digunakan. Penyajian data yaitu menyajikan data yang sudah dipilih dalam bentuk tulisan, grafik, gambar, dan tabel. Verifikasi adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah disajikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Galur

Implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Galur merupakan model pembudayaan dan pembiasaan nilai-nilai dalam aktivitas dan suasana sekolah. Salah satu bentuk pendidikan antikorupsi yang sudah diterapkan di SMP Negeri 1 Galur yaitu kantin kejujuran. Kantin kejujuran bersifat pembiasaan/pembudayaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah. Pembiasaan sangat penting karena dengan pembiasaan itulah suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian hari. Berdasarkan pembiasaan itulah nantinya siswa memiliki bekal yang akan membentuk karakternya. Pembiasaan yang baik tentunya akan menghasilkan kepribadian yang baik, sedangkan pembiasaan yang buruk akan membentuk kepribadian yang buruk pula.

Kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur sudah berjalan selama dua tahun, sejak tahun ajaran 2015/2016. SMP Negeri 1 Galur merupakan salah satu sekolah yang menjalankan program kantin kejujuran dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Kejaksaan Negeri Kulon Progo memiliki salah satu program yaitu Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Salah satu program JMS adalah mendirikan kantin kejujuran di beberapa sekolah negeri di Kulon Progo. Kantin kejujuran berhasil didirikan atas dasar bentuk kerjasama antara SMP Negeri 1 Galur dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

Bentuk dalam implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Galur masih sebatas dalam kegiatan mekanisme jual-beli di kantin kejujuran. Mekanisme pelaksanaan kantin kejujuran yaitu siswa mengambil sendiri makanan/minuman yang diinginkan, menulis makanan/minuman yang dibeli ke dalam buku pembelian, dan membayar makanan/minuman tersebut sesuai dengan harga yang tercantum di daftar harga makanan dan minuman. Kegiatan pembiasaan kantin kejujuran ini dilakukan setiap hari yaitu Senin-Jum'at pada waktu istirahat.

Implementasi pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur belum terlaksana dengan sistematis. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan pengurus kantin yang kurang terstruktur, belum adanya program kerja yang jelas, tidak ada Standar Operasional Prosedur di kantin kejujuran, dan manajemen pengelolaan yang masih sederhana. Salah satu faktor penghambat dalam menjalankan

implementasi pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur adalah masih ada beberapa siswa yang belum bersikap jujur sehingga kantin kejujuran mengalami kerugian. Solusi untuk mengantisipasi terjadinya kerugian di kantin kejujuran adalah melalui penguatan pendidikan karakter (PPK). Kegiatan PPK yang dijalankan di SMP Negeri 1 Galur diharapkan mampu membentuk karakter positif bagi siswa.

a. Perencanaan Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Galur

Kegiatan sekolah yang *pertama* dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada siswa tentang adanya kantin kejujuran. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kulon Progo bertepatan dengan peresmian kantin kejujuran pada tanggal 22 Agustus 2016. Sosialisasi ini menyampaikan kepada siswa bahwa SMP Negeri 1 Galur melaksanakan pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran. Sosialisasi ini sebagai langkah awal untuk menyampaikan pendidikan antikorupsi kepada siswa.

Kedua, perumusan tujuan kantin kejujuran. Pembentukan kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur memiliki tujuan untuk melatih siswa bersikap jujur, mandiri, dan taat terhadap peraturan yang ada. Tujuan inilah yang nantinya harus dicapai dalam pelaksanaan kantin kejujuran. Indikator keberhasilan kantin kejujuran adalah tercapainya tujuan dari kantin tersebut.

Ketiga, pembentukan pengurus di kantin kejujuran yang bertugas untuk mengelola kantin kejujuran. Pengelola kantin kejujuran adalah salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Galur. Idealnya sebuah kantin kejujuran dikelola oleh siswa itu sendiri. Guru disini berperan sebagai pegawai berjalannya kantin kejujuran. Pembentukan pengurus kantin kejujuran haruslah melibatkan siswa karena siswa termasuk bagian penting dalam menjalankan kantin kejujuran. Partisipasi siswa di kantin kejujuran SMP Negeri 1 Galur yaitu sebagai petugas piket. Petugas piket disini bertugas untuk menjaga dan mengawasi kantin kejujuran ketika istirahat. Petugas piket berasal dari pengurus OSIS yang dipilih, setiap hari biasanya ada dua siswa yang ikut bertugas di kantin

kejujuran. Berikut ini adalah jadwal piket di kantin kejujuran :

Tabel 02. Jadwal Piket Kantin Kejujuran

SENIN	SELASA	RABU
SALSABILA ATHALIEANI	NISA DWI KURNIAWATI	DEANI ALIFAH PUTRI
DIFA SALSABILA R.	LATISYA TIARA IMMERA	RIZQI AMALIA FIRDAUS
KAMIS	JUMAT	SABTU
CICILIA WIDHI ASTUTI	ENDAH SULISTYANINGRUM	DARA AYU WANDA
WENING DAMASTUTI	NAJMI NIRMALA	REDYTA DWI CAHYANI

Sumber : Data Kantin Kejujuran

Keempat, pembuatan program kerja yaitu susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk di laksanakan dalam satu periode kepengurusan. Program kerja di kantin kejujuran belum tersusun secara sistematis. Artinya, kantin kejujuran di sini masih hanya dianggap sebagai tempat dijualnya makanan dan minuman dimana tidak ada pengawasnya. Kantin kejujuran tidak memiliki program khusus untuk melatih siswa berbuat jujur. Pembiasaan yang ada di kantin kejujuran hanya sekedar membiasakan siswa jujur pada saat membeli di kantin kejujuran.

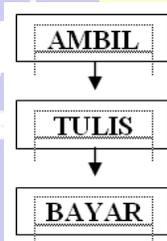
Kelima, pendanaan dalam menjalankan kantin kejujuran berasal dari sekolah dan bantuan dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Dana ini digunakan sebagai modal dalam menjalankan kantin kejujuran. Modal dalam hal ini adalah pemenuhan barang dagangan termasuk peralatan-peralatan yang diperlukan di kantin kejujuran.

Keenam, penyusunan Standart Operasional Prosedur yang ada di kantin kejujuran juga belum tersusun secara sistematis. Hal ini dapat dilihat dari tidak jelasnya peraturan siswa ketika berada di kantin kejujuran. Kantin kejujuran haruslah memuat SOP yang jelas sehingga siswa dapat memposisikan dirinya ketika berada di kantin. SOP ini memuat peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa sebelum memasuki kantin hingga keluar kantin kejujuran.

Ketujuh, pengadaan sarana dan prasarana yang terkait dengan kantin kejujuran sudah tergolong lengkap. Salah satu penunjang untuk menjalankan kantin kejujuran adalah melengkapi segala sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana untuk menjalankan kantin kejujuran adalah : meja, kursi, kotak uang, daftar harga barang, poster tata cara pembelian, dan buku pembelian barang.

b. Pelaksanaan Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Galur

Pelaksanaan kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur, *Pertama* manajemen pengelolaan kantin yang terdiri dari penentuan barang dan harga barang tersebut, pengadaan barang dagangan, dan mekanisme menjalankan kantin kejujuran. Penentuan jenis barang di kantin kejujuran terdiri dari : makanan ringan, makanan basah, dan minuman. Sedangkan harga yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan siswa untuk membeli, artinya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Pengadaan barang dagangan dilakukan sendiri oleh pengelola kantin yaitu dengan memesan kepada agen distributor. Padahal, seharusnya pengadaan barang dilakukan sendiri oleh siswa sehingga siswa dapat memilih makanan dan minuman yang sesuai dengan keinginan. Mekanisme dalam pelaksanaan kantin kejujuran yaitu siswa mengambil sendiri barang yang diinginkan, siswa mencatat sendiri barang yang dibeli, siswa meletakkan sendiri uang pembayaran di kotak uang, siswa mengambil sendiri uang kembalian (bila ada), apabila ada siswa yang belum/lupa/tidak membayar harus memiliki kesadaran masing-masing untuk membayar di hari berikutnya. Mekanisme pelaksanaan kantin kejujuran dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Gambar 01. Tata Cara di Kantin Kejujuran
Sumber : Data Kantin Kejujuran

Kedua, manajemen pengelolaan kantin kejujuran dikelola oleh satu pengelola kantin yang bertugas untuk membuka dan menutup kantin, menyediakan barang dagangan, dan membuat laporan keuangan. Idealnya sebuah kantin kejujuran yang baik adalah dikelola oleh siswa itu sendiri. Siswa ikut berperan dalam pembelian barang dagangan, mencatat administrasi, termasuk pembuatan laporan keuangan kantin kejujuran. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, tujuan kantin kejujuran dalam

membentuk perilaku jujur kepada siswa dapat efisien. Nilai kejujuran di kantin kejujuran bukan hanya dilihat dari aktivitas siswa di dalam kantin kejujuran saja, tetapi dilihat dari kegiatan kantin kejujuran yang lain. Agar kantin kejujuran berjalan dengan baik maka diperlukan pendampingan dan pengawasan dari guru dan kepala sekolah.

Ketiga, kantin kejujuran tentunya akan berdampak terhadap perkembangan karakter siswa yang ada di SMP Negeri 1 Galur. Membiasakan karakter antikorupsi melalui kantin kejujuran tidaklah mudah dan cepat, diperlukan strategi khusus agar kantin kejujuran dapat berjalan dengan baik. Keberadaan kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur ini memberikan pengaruh khususnya bagi siswa dalam pembentukan karakter. Pembentukan karakter di kantin kejujuran mengacu pada indikator nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi yaitu (Wijayanti, 2016: 110-112) : kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, keadilan. Karakter antikorupsi tersebut dilihat berdasarkan hasil observasi di kantin kejujuran dan observasi perilaku siswa di dalam kelas.

Keempat, partisipasi warga sekolah dalam mengembangkan kantin kejujuran. Partisipasi dalam menjalankan kantin kejujuran terbagi atas partisipasi dari pihak sekolah, partisipasi dari bapak ibu guru, dan partisipasi dari siswa. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi yang sangat penting dilakukan adalah berasal dari siswa. Kantin kejujuran tidak bisa berjalan tanpa adanya kejujuran dari siswa itu sendiri. Apabila siswa mau berkerjasama dan mengerti untuk bersikap jujur, kantin kejujuran tentunya akan terus berjalan. Kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur masih berjalan hingga saat ini karena siswa pada umumnya memiliki karakteristik yang baik. Selain itu, kepedulian guru tentang banyaknya kasus korupsi juga memberikan motivasi kepada siswa di kelas untuk menghindari perbuatan korupsi. Peran serta kepala sekolah sangat penting untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kantin kejujuran.

c. Evaluasi Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Galur

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui informasi sejauh mana suatu kegiatan tersebut telah tercapai. Informasi tersebut dapat diketahui berhasil atau tidak dengan membandingkan perbedaan antara hasil sebelumnya dan hasil yang terbaru. Evaluasi kantin kejujuran dimulai dari *pertama*, pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan di kantin kejujuran dilakukan oleh pengelola kantin. Pembuatan laporan keuangan dilakukan pada setiap hari terutama untuk makanan basah. Pengelola kantin menulis di buku laporan keuangan jumlah keuntungan yang diperoleh pada hari itu. Setelah satu bulan kemudian, pengelola merekap semua data yang diperoleh untuk dijadikan laporan keuangan yang sistematis. Apabila memungkinkan, pembuatan laporan keuangan kantin kejujuran juga dapat melibatkan siswa. Siswa juga dapat berlatih untuk membuat laporan keuangan sederhana. Hal ini juga akan melatih siswa untuk berbuat jujur yaitu jujur dalam menuliskan jumlah barang dan jujur dalam menghitung uang yang diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa untuk melatih siswa jujur bukan hanya dilihat ketika siswa membeli makanan dan minuman saja, tetapi melibatkan siswa dalam proses evaluasi juga diperlukan.

Kedua, pelaporan laporan keuangan kantin kejujuran kepada kepala sekolah. Setiap bulan pengelola melaporkan hasil keuangan kantin kejujuran kepada kepala sekolah apakah mengalami kerugian atau keuntungan. Setelah tahap pelaporan selesai, di akhir tahun akan diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dihadiri oleh seluruh guru dan staff SMP Negeri 1 Galur untuk membahas tentang koperasi sekolah dan kantin kejujuran. Hasil dari RAT tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan tentang bagaimana keberlanjutan kantin kejujuran. Berdasarkan hasil RAT kantin kejujuran pada akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa kantin kejujuran pernah mengalami kerugian, tetapi kerugian tersebut masih bisa ditutupi sehingga modal untuk menjalankan kantin kejujuran masih berjalan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Galur

Faktor yang mendukung dalam menjalankan kantin kejujuran adalah SMP Negeri 1 Galur sudah menjalankan kurikulum 2013 dengan berfokus pada pendidikan karakter. SMP Negeri 1 Galur merupakan sekolah panutan bagi sekolah lainnya dalam menjalankan kurikulum 2013. Berbagai program sudah dijalankan salah satunya adalah PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). PPK ini sangat membantu dalam membentuk karakter siswa selain melalui program kantin kejujuran. Oleh karena itu, apabila PPK ini dapat berjalan dengan baik maka kantin kejujuran juga akan berjalan dengan lancar.

Faktor pendukung yang berikutnya adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan program kantin kejujuran merupakan program yang berasal dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo sehingga segala keperluan berupa sarana dan prasarana juga harus lengkap agar sekolah dapat menjalankan fungsi dari kantin kejujuran. Selain dari lengkapnya sarana dan prasarana, partisipasi dari warga sekolah juga diperlukan karena kantin kejujuran tidak dapat berjalan tanpa adanya bentuk kerjasama yang terjalin terutama dengan siswa.

Faktor yang menghambat kantin kejujuran adalah dari manajemen pengelolaan kantin dan keterlambatan penyediaan barang dangangan. Manajemen pengelolaan kantin masih harus diperbaiki lagi mengingat sistem piket kantin yang tidak berjalan dengan efisien dan masih ada kerugian yang terjadi. Selanjutnya adalah keterlambatan penerimaan barang terjadi karena dari pihak agen distributor terlambat dengan alasan sudah banyak pesanan menyebabkan barang-barang yang dibutuhkan siswa terutama peralatan sekolah juga mengalami hambatan. Apabila barang yang tersedia di kantin sedikit otomatis pendapatan yang diterima juga sedikit. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar penerimaan barang untuk memenuhi kebutuhan siswa tidak terhambat lagi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

a. Perencanaan Kantin Kejujuran

Perencanaan kantin kejujuran dimulai dari sosialisasi program, perumusan tujuan,

pembentukan pengurus, pembuatan program kerja, pendanaan, penyusunan SOP, dan pengadaan sarana dan prasarana. Sosialisasi program dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada tanggal 22 Agustus 2016. Perumusan tujuan kantin kejujuran yaitu membiasakan siswa untuk bersikap jujur. Pembentukan pengurus di kantin kejujuran belum tersusun secara sistematis. Pembuatan program kerja di kantin kejujuran belum ada dan tidak jelas. Pendanaan kantin kejujuran didapatkan dari sumber internal dan eksternal. Pengadaan sarana dan prasarana di kantin kejujuran sudah cukup lengkap.

b. Pelaksanaan Kantin Kejujuran

Pelaksanaan kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Galur adalah *pertama*, mekanisme pelaksanaan. Mekanisme pelaksanaan kantin kejujuran meliputi : penentuan jenis barang dan pengadaan barang. *Kedua*, manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan kantin meliputi : pengelolaan kantin dan strategi pengelolaan kantin. *Ketiga*, perkembangan karakter siswa. Perkembangan karakter siswa meliputi karakter kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. *Keempat*, partisipasi warga sekolah. Partisipasi warga sekolah meliputi partisipasi sekolah, partisipasi bapak ibu guru, dan partisipasi siswa.

c. Evaluasi Kantin Kejujuran

Evaluasi kantin kejujuran dimulai dari pengelola mengumpulkan data berupa hasil pemasukan dan pengeluaran kantin kejujuran, data tersebut nantinya dianalisis dan dikelola untuk selanjutnya adalah dilaporkan kepada kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah menindaklanjuti dari laporan tersebut untuk dapat mengambil keputusan bagaimana kantin kejujuran selanjutnya.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Kantin Kejujuran

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kantin kejujuran ialah adanya jadwal piket kantin kejujuran, adanya PPK, sarana dan prasarana yang memadai, dan partisipasi dari warga sekolah. Faktor penghambat pelaksanaan kantin kejujuran ialah manajemen pengelolaan dan keterlambatan penerimaan barang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut :

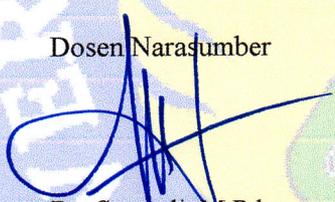
- a. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Yogyakarta sebagai pengambil kebijakan bahwa sebaiknya program pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan oleh seluruh sekolah, mengingat program ini sebagai upaya preventif dan bermanfaat untuk menciptakan generasi yang bersih dari tindakan korupsi.
- b. Bagi Sekolah, hendaknya secara mandiri dapat memberikan pembinaan yang berkelanjutan, efektif dan efisien kepada warga sekolah agar menjadi proses pembiasaan, dapat mengembangkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan dapat menyediakan buku-buku terkait pendidikan antikorupsi agar dapat memperluas pemahaman siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti Corruption Clearing House (ACCH)*. (2017). *Tindak Pidana Korupsi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>. diakses tanggal 3 Desember 2017.
- Indonesian Corruption Watch (ICW)*. (2010). *KPK Soal Bangkrutnya Kantin Kejujuran; Jadi Pertanda Korupsi Dini*. Diakses pada tanggal 5 Januari 2018 dari <https://antikorupsi.org/news/kpk-soal-bankrutnya-kantin-kejujuran-jadi-pertanda-korupsi-dini>.
- Miles, M. B & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
- Muhammad Taufiqurrahman. (2016). *Serikat Guru : Jual Beli dan Mencontek Jawaban UN Masih Marak*. *Detik News*. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018 dari <https://news.detik.com/berita/3180153/serikat-guru-jual-beli-dan-mencontek-jawaban-un-masih-marak>).
- Mustari, Mohamad. (2014). *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Nurdjana, IGM. (2005). *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosikah, C.D. dan Listianingsih D.M. (2016). *Pendidikan antikorupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supardan, D. (2015). *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial; Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanto, A. (2014). *Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wijayanti, Daru. (2016). *Revolusi Mental : Menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi*. Yogyakarta: Indoliterasi.

Dosen Narasumber


Dr. Supardi, M.Pd
NIP. 19730315 200312 1 001

Yogyakarta, 17 Juli 2018
Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. Nasiwan, M.Si
NIP. 19650417 200212 1 001